

PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI MELALUI REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUKAMAKMUR

Juliansyah Afriadi Hasibuan¹, Rachmat Ramdani², Kariena Febriantini³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
email: adialog19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait pencegahan patologi birokrasi dengan melakukan reformasi administrasi pelayanan publik pada Desa Sukamakmur. Birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut bergerak cepat dan tepat sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, karena suatu fenomena itu akan dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian dimana fenomena tersebut berlangsung. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu patologi birokrasi pada Desa Sukamakmur Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang meliputi penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat, kewajiban sosial sebagai beban, kondisi kerja yang kurang memadai; pekerjaan tidak kompatibel, tidak adanya indikator kinerja; dan sarana yang tidak memadai.

Kata kunci: Patologi, Birokrasi, Administrasi, Pelayanan

Abstract

This research aims to analyze reforms related to preventing bureaucratic pathology by administering public services in Sukamakmur Village. The government bureaucracy as a public service provider is required to move quickly and precisely so that it can provide optimal service. However, the implementation of public services in Indonesia is still faced with a system that is not yet effective and efficient. In this research, the method used is a qualitative method with data collection techniques used are interviews, observation and documentation. This technique is used by researchers, because a phenomenon will understand its meaning well, if the researcher interacts with the research subject where the phenomenon takes place. The research results found were bureaucratic pathology in Sukamakmur Village, East Teluk Jambe District, Karawang Regency, namely inappropriate placement of goals and targets, social obligations as a burden, inadequate working conditions; incompatible jobs, absence of performance indicators; and inadequate facilities.

Keywords: Pathology, Bureaucracy, Administration, Services

PENDAHULUAN

Negara mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya melalui birokrasi. Perwujudan dari kewajiban tersebut, maka negara dituntut untuk terlibat langsung menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Dalam rangka itulah, maka negara membangun suatu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut birokrasi (Anwar, et al., 2023:4). Menurut Jubaedah dan Agustino (2023:4) birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui hampir seluruh kegiatan pemerintahan dilakukan oleh para birokrat ini mulai dari urusan administrasi hingga pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan birokrasi pemerintah seringkali dipandang secara dikotomis, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sehari-hari, birokrasi juga seringkali dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tersendat dan bertele-tele. Buruknya pelayanan publik tersebut disebabkan karena adanya patologi birokrasi tersebut

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sikap para aparatur birokrasi Aparatur Sipil Negara) seperti jujur, cermat, dan disiplin yang seperti diatur dalam pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diwujudkan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan sesuai dengan Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004.

Birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut bergerak cepat dan tepat sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Despreza dan Budiono (2023:3), “disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian waktu penyelesaiannya, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar, persyaratan yang kurang transparan dan sikap petugas yang kurang responsif sehingga menimbulkan citra buruk pemerintah di mata masyarakatnya sendiri terutama di mata masyarakat awam yang tidak tahu-menahu tentang pelayanan publik”.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 21 menjelaskan tentang komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, biaya, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, jaminan keamanan dan evaluasi kerja.

Gejala patologi (penyakit) birokrasi telah lama menggerogoti sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia. Patologi birokrasi merupakan sesuatu yang kompleks, karena memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek organisasional baik yang menyangkut struktur maupun kultur (Handoyo, et al., 2022:4). Kemudian, menurut Hasyem dan Ferizaldi (2020:3) menyatakan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Selanjutnya Holifah, et al (2023:4) menyatakan bahwa patologi birokrasi seperti sebuah penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal. Patologi birokrasi membuat pelaksanaan administrasi instansi menjadi kurang baik. Menurut Fidiyanti dan Ismail (2023:3) menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi yang baik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien.

Administrasi yang baik juga meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksananya. Administrasi suatu instansi sangat berpengaruh terhadap pelayanan administrasi publik atau pelayanan umum. Pelayanan administrasi yang baik mengharuskan instansi pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendahulukan kepuasan masyarakat.

Kultur suatu birokrasi tak bisa dilepaskan dari kultur sosial di masyarakat luas. Kultur organisasi penting dipahami sebagai alat pengendali perilaku para anggota birokrasi pemerintah. Bentuk-bentuk patologi dan berbagai faktor penyebabnya pada dasarnya dapat diidentifikasi, namun solusi untuk mengatasinya bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini seperti yang dialami Indonesia, di mana reformasi birokrasi telah lama dilakukan oleh pemerintah, namun sampai saat ini sistem birokrasi belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Memang setiap birokrasi tidak ada yang kebal dari berbagai penyakit birokrasi dan dirasakan sangat sulit untuk dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Hal ini adalah sebagai suatu tantangan dan sekaligus tuntutan bagi birokrasi pemerintah ke depan. Tantangan yang harus dihadapi bukan hanya oleh birokrasi pemerintah yang kemungkinan menderita penyakit birokrasi seperti gaya manajerial para pejabat misalnya penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta pilih kasih, kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana misalnya ketidaktepatan tindakan dan kemampuan rendah, melanggar norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku misalnya penggemukkan biaya dan menerima sogok. Akan tetapi tantangan juga dari seluruh masyarakat yang mengalami perubahan dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial (Ramadhan, et al., 2023:6).

Tuntutan masyarakat semakin meningkat kepada birokrasi agar semakin terbuka, transparan, makin produktif dan mampu memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam situasi yang demikian, maka kinerja birokrasi melalui aparatur negara harus benar-benar bertindak demi kepentingan bangsa dan negara dan agar dalam menyelenggarakan fungsinya, birokrasi berpegang pada berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Desa Sukamamkmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang selaku salah satu birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi desa seperti pembuatan KTP, surat Keterangan Lahir, Perubahan Data Kartu Keluarga, Pengurusan surat kematian dan lain lain dituntut bekerja secara profesional serta mampu secara cepat merespon aspirasi, tuntutan publik dan perubahan lingkungan lainnya dengan cara kerja yang lebih bersahaja dan berorientasi kepada masyarakat daripada berorientasi kepada atasan seperti yang terjadi selama ini dalam lingkungan birokrasi publik.

Selanjutnya Saktiananda, et al (2023:3) mengelompokkan patologi birokrasi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi, patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan administrasi, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, dan patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Adapun beberapa jenis penyakit birokrasi yang sudah sangat dikenal dan dirasakan masyarakat yaitu ketika mengurus sesuatu keperluan di birokrasi pemerintah, pengurusannya berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, pelayanannya kurang ramah, terjadinya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Sedangkan penyakit birokrasi yang lebih sistemik banyak sebutan yang diberikan terhadapnya yaitu antara lain; politisasi birokrasi, otoritarian birokrasi, birokrasi katabelece (Borut, 2021:4).

Berdasarkan pemaparan latar belakang, reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukamamkmur Kabupaten Karawang dalam meningkatkan pelayanan administrasi publik dan peneliti tertarik untuk menganalisa terkait kinerja yang dilakukan Pemerintah Desa Sukamamkmur Kabupaten Bekasi dalam memberikan perubahan dalam pelayanan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan karakteristik-karakteristik (a) berpijak pada konsep naturalistik, (b) kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, berubah, (c) hubungan peneliti dengan obyek berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, bersifat subyektif, judgment, (d) Setting penelitian alamiah, terkait tempat dan waktu, (e) Analisis subyektif, intuitif, rasional, (f) hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, situasional.

Secara garis besar, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non interaktif. Ada lima macam metode kualitatif interaktif, yaitu metode etnografik, metode fenomenologis, studikusus, teori dasar (grounded theory), dan studi kritikal. Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk pendekatan yang memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadidari waktu ke waktu; peneliti seolah-olah bertindak selaku saksi hidup dariperubahan itu. Studi kasus dapat digunakan secara tepatdalam banyak bidang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, karena suatu fenomena itu akan dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitiandimana fenomena tersebut berlangsung. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

Kemudian teknik observasi, ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau pengamatan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dengan

teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi deskriptif (descriptive observation) secara luas, yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi di sana. Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti dapat menyempitkan datanya dan mulai melakukan observasi terfokus. Peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan observasi selektif (selective observation). Sekalipun demikian, peneliti masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data. Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Format rekaman hasil observasi catatan lapangan dalam penelitian ini menggunakan format rekaman hasil observasi.

Terakhir teknik dokumentasi, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional. Teknik dokumentasi sengaja digunakan dalam penelitian ini, sebab : pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari waktu; kedua, merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan; ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya; keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format rekaman dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi, Pada penelitian di Desa Sukamakmur ditemukan praktek patologi birokrasi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat birokrasi, seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan; persepsi atas dasar prasangka; mengaburkan masalah; menerima sogok; pertentangan kepentingan; cenderung mempertahankan status quo; empire building; bermewah-mewah; pilih kasih; takut pada perubahan, inovasi, dan resiko; penipuan; sikap sombong; ketidakpedulian pada kritik dan saran; tidak mau bertindak; takut mengambil keputusan; sifat menyalahkan orang lain; tidak adil; intimidasi; kurang komitmen; kurang koordinasi; kurang kreativitas; kredibilitas rendah; kurangnya visi yang imajinatif; kedengkian; nepotisme; tindakan tidak rasional; bertindak diluar wewenang; paranoid; patronase; keengganan mendelegasikan; ritualisme; keengganan pikul tanggung jawab; dan xenophobia.

Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, pada Desa Sukamakmur Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang juga terjadi karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional seperti: ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan; ketidaktepatan; rasa puas diri; bertindak tanpa berpikir; kebingungan; tindakan yang tidak produktif; tidak adanya kemampuan berkembang; mutu hasil pekerjaan yang rendah; kedangkalan; ketidakmampuan belajar; ketidaktepatan tindakan; inkompetensi; ketidakcekan; ketidakteraturan; melakukan tindakan yang tidak relevan; sikap ragu-ragu; kurangnya imajinasi; kurangnya prakarsa; kemampuan rendah; bekerja tidak produktif; ketidakrapian; dan stagnasi.

Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Desa Sukamakmur Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berfaktor pada tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: penghematan biaya; menerima sogok; ketidakjujuran; korupsi; tindakan kriminal; penipuan; kleptokrasi; kontrak fiktif; sabotase; tata buku tidak benar; dan pencurian

Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsi atau negatif pada Desa Sukamakmur Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang yaitu perilaku para birokrat yang bersifat disfungsi atau negatif, seperti: bertindak sewenang-wenang; pura-pura sibuk; paksaan; konspirasi; sikap takut; penurunan mutu; tidak sopan; diskriminasi; dramatisasi; sulit dijangkau; sikap tidak acuh; tidak disiplin; kaku; tidak berperikemanusiaan; tidak peka; tidak sopan; tidak peduli tindak; salah tindak; semangat yang salah tempat; negativisme; melalaikan tugas;

tanggungjawab rendah; lesu darah; paparazi; melaksanakan kegiatan yang tidak relevan; utamakan kepentingan sendiri; suboptimal; imperatif wilayah kekuasaan; tidak profesional; sikap tidak wajar; melampaui wewenang; vested interest; dan pemborosan.

Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan pada Desa Sukamakmur Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang yaitu penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat; kewajiban sosial sebagai beban; eksploitasi; tidak tanggap; pengangguran terselubung; motivasi yang tidak tepat; imbalance yang tidak memadai; kondisi kerja yang kurang memadai; pekerjaan tidak kompatibel; tidak adanya indikator kinerja; miskomunikasi; misinformasi; beban kerja yang terlalu berat; terlalu banyak pegawai; sistem pilih kasih; sasaran yang tidak jelas; kondisi kerja yang tidak nyaman; sarana dan prasarana yang tidak tepat; dan perubahan sikap yang mendadak.

SIMPULAN

Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja Pemerintah Desa Sukamakmur memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Pelayanan administrasi publik lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, dan negatif. Citra buruk atau negatif tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, lambatnya pelayanan, dan di ikuti dengan prosedur yang berbelit-belit dan lain sebagainya. Sehingga keadaan tersebut merusak hubungan antara manusia, menghancurkan komunitas politik, dan meluhlantakkan cita-cita negara hukum (Indrayana, 2008). Akan tetapi pada penelitian ini bisa disimpulkan bahwa praktik patologi birokrasi tidak terjadi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten karawang.

SARAN

Pemerintah Desa Sukamakmur dalam melakukan reformasi administrasi pelayanan publik perlu ditingkatkan kembali terkait sarana maupun prasaran dalam melayani masyarakat, sehingga pelayanan birokrasi dapat berjalan dengan lancar, serta perlunya pelatihan untuk seluruh pegawai agar dapat bekerja profesional. Lebih lanjut, diperlukan adanya sebuah keterlibatan masyarakat dalam memberikan aspirasinya, sehingga dapat menjadi acuan dalam memberikan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H., Mulyadi, M., & Helmi, H. (2023). NETRALITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KELINDAN POLITIK PRAKTIS PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMENEP. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 3(1).
- Borut, M. (2021). Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Kota Ambon. *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(2), 14-30.
- Despazeza, H., & Budiono, P. (2023). URGENSI DESENTRALISASI ADMINISTRASI DI INDONESIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2963-2970.
- Fidiyanti, A. D., & Ismail, H. (2023). ETIKA PERILAKU PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(02), 87-94.
- Handoyo, B. D., Arisyahidin, A., & Daroini, A. (2022). Identifikasi Patologi Birokrasi Guna Mewujudkan Good Governance Di Kantor Kelurahan Pemerintah Kota Kediri. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 228-236.
- Hasyem, M., & Ferizaldi, F. (2020). Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 14(2), 147-162.
- Holifah, N., Ikmal, N. M., & Hidayati, L. N. (2023). Patologi Birokrasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Tinjauan Terhadap Fenomena “Pungli Anggaran Pembangunan”). *Prosiding Nasional FISIP Universitas Islam Syekh-Yusuf*, 1, 1-9.
- Jubaedah, E., & Agustino, L. (2023). Mekanisme Penyederhanaan Birokrasi Melalui Penyetaraan dan Pengalihan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Kabupaten Serang. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 61-71.

- Ramadhan, K. R., Hakim, L., & Aditya, I. (2023). PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI E-KTP DI KELURAHAN MALAKA SARI. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Saktiananda, R. A., Fautanu, I., & Mau, H. A. (2023). Penguatan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja ASN Kemendagri Republik Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 145-152.